

LAPORAN AKHIR TAHUN



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
BRMP NTB 2025**

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANJAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
2025**

PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR TAHUN



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
BRMP NTB 2025**

Mengetahui
Kepala Balai



Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
NIP. 19671114 199803 1 001

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28 F UUD 1945.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Mataram, 31 Desember 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	3
II. Hasil	3
III. Penutup	10
IV. Lampiran	1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (BRMP NTB) menegakkan komitmennya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan cepat kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pergeseran dalam tatanan komunikasi, memungkinkan akses informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Dalam kaitannya, BRMP NTB tidak hanya menyediakan layanan informasi melalui kanal konvensional, tetapi juga terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Pendekatan keterbukaan informasi tidak hanya diterapkan pada tingkat nasional, tetapi juga secara lokal di NTB. BRMP NTB merespons era digital dengan mengembangkan aplikasi mobile PPID berbasis Android, memudahkan masyarakat untuk mengakses, memohon, dan berinteraksi dengan informasi yang relevan.

Selain itu, melalui beberapa saluran dan beberapa fasilitas PPID BRMP NTB berupaya untuk tidak hanya menyediakan data, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat seputar isu-isu pertanian dan inovasi terkait. Fasilitas yang disediakan menjadi langkah proaktif dalam membuka pintu informasi dan sebagai wadah belajar interaktif seputar teknologi pertanian modern dan praktik berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, PPID di BRMP NTB bertujuan tidak hanya memenuhi standar layanan informasi publik yang ditetapkan, tetapi juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan inovasi di wilayah ini. Melalui inisiatif ini, BRMP NTB berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi dan pendidikan di bidang pertanian, mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan komunitas di Nusa Tenggara Barat.

B. Maksud dan Tujuan

Menyediakan bahan dan memberikan informasi yang dibutuhkan publik melalui berbagai saluran dan media guna tercapainya kepuasan pemohon atas pelayanan BRMP NTB melalui penerapan Standar Pelayanan Publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang dilaporkan melalui portal PPID dan Website Inspektorat Jenderal meliputi dua aspek, yaitu jenis informasi, dan saluran Informasi. Berikut penjelasan atas kedua

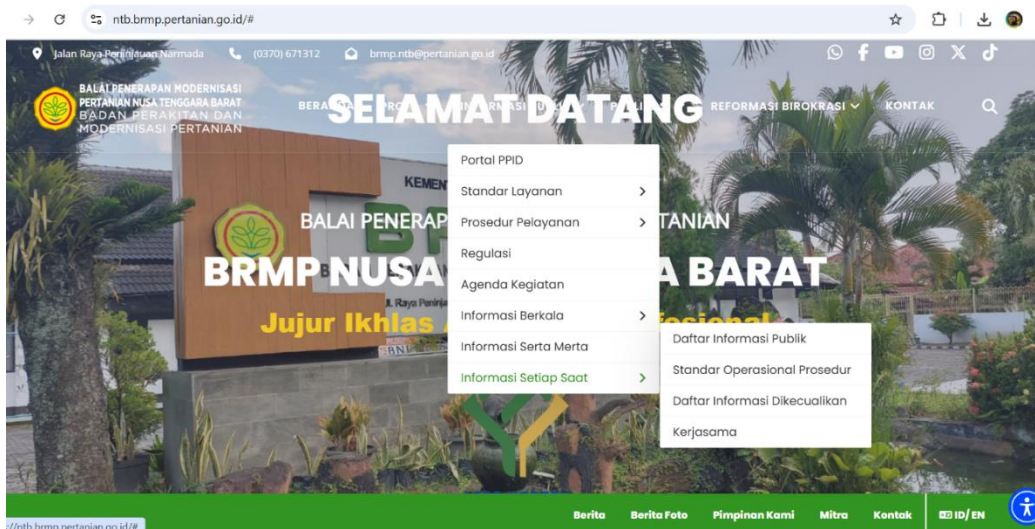
hal tersebut:

1. Jenis informasi

- Setiap Saat

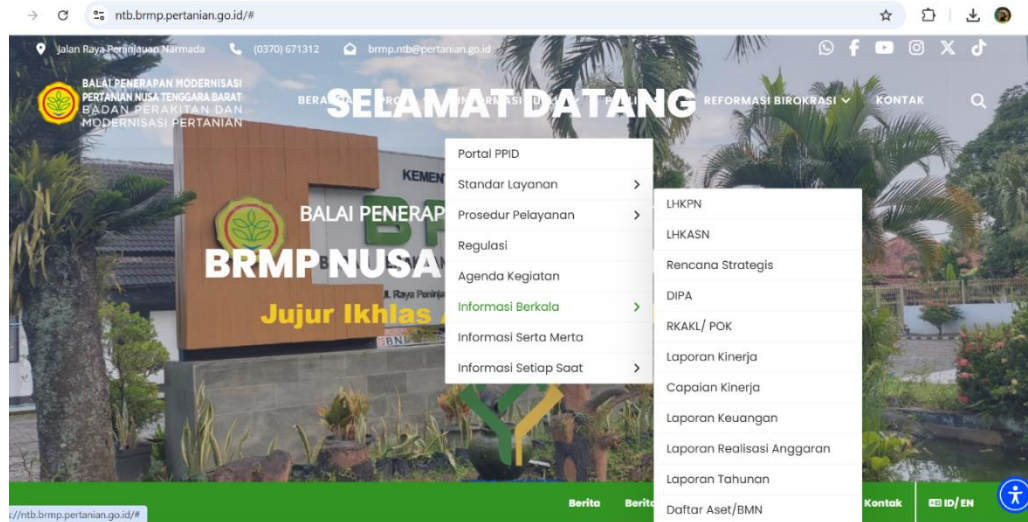
Informasi yang masuk dalam katagori setiap saat sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62 Tahun 2011 adalah profil unit kerja, yang terdiri dari Visi, Misi, Struktur

Organisasi, Dasar Hukum, Sejarah, Tugas dan Fungsi, dan Profil Pejabat (nama, jabatan, alamat dan nomor telp unit kerja, email resmi pertanian, penghargaan yang telah diterima dan LHKPN yang telah diverifikasi KPK).



- Berkala

Portal PPID BRMP NTB menyediakan berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat hingga bulan September 2025, termasuk DIPA, laporan IKM, data statistik keuangan dan kepegawaian, catatan atas laporan BMN, laporan keuangan, MOU kerjasama dalam dan luar negeri, realisasi anggaran, LAKIP BPTP NTB, laporan kinerja tahunan balai, fasilitas layanan PPID, LHKPN BRMP NTB, RKA-KL, renstra, informasi regulasi, laporan PPID, SOP, rencana kerja tahunan, peringatan dini bencana, standar pelayanan publik, informasi barang dan jasa, penandatanganan komitmen bersama tahun 2025, kehadiran dalam kegiatan PPID utama, sarana prasarana, komitmen organisasi, dan informasi yang dapat diakses setiap saat. Semua informasi ini bertujuan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi publik dalam memperoleh data yang relevan terkait kinerja dan kegiatan pemerintah di NTB.



3. Sumber Daya Manusia Dan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek kunci dalam kelancaran suatu organisasi, termasuk di dalamnya Pusat Informasi dan Dokumentasi (PPID). SDM yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PPID dalam mengelola informasi publik. Pentingnya SDM PPID untuk memahami regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian integral dalam pelaporan PPID.

Sementara itu, alokasi anggaran yang memadai juga perlu diperhatikan agar PPID dapat berfungsi optimal dalam menyediakan informasi publik secara cepat dan akurat kepada masyarakat.

Keterlibatan SDM yang kompeten dan anggaran yang memadai membentuk fondasi kokoh untuk menjaga integritas dan transparansi PPID, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan informasi yang disediakan.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBN tahun 2025 yang melekat pada kegiatan kehumasan dan Pelayanan Publik

Sementara untuk petugas PPID pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi pada Balai penerapan standar instrumen pertanian NTB tahun anggaran 2025 masih mengacu pada SK NO: 382/OT.050/H.12.17/03/2025 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan dan Kegiatan
1	Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si	Kepala Balai	Supervisor/Penasehat

2	drh. Luh Gde Sri Astiti, M.Si	Ketua Tim Kerja Diseminasi	Ketua
3	Sylvia Kusumaputri Utami, SP., MSc	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi	Sekretaris
4	Muhammad Yasin, SP., MM	Kasubag Tata Usaha	Anggota
5	Ria Rustiana, SST., MSi	Koordinator Unit Informasi Publik dan Kehumasan	Anggota
6	Hiryana Windiyani, SP., MP	Koordinator Unit UPBS Tanaman	Anggota
7	Titin Sugianti, SP	Koordinator Unit Lab Penguji	Anggota
8	drh. Mutya Fadhilah., M.Pt	Koordinator Unit UPBS Ternak	Anggota
9	drh. Hijriah	Koordinator Unit Perpustakaan	Anggota
10	Arie Sudarmayanti, SP., M.Si	Koordinator Monev	Anggota

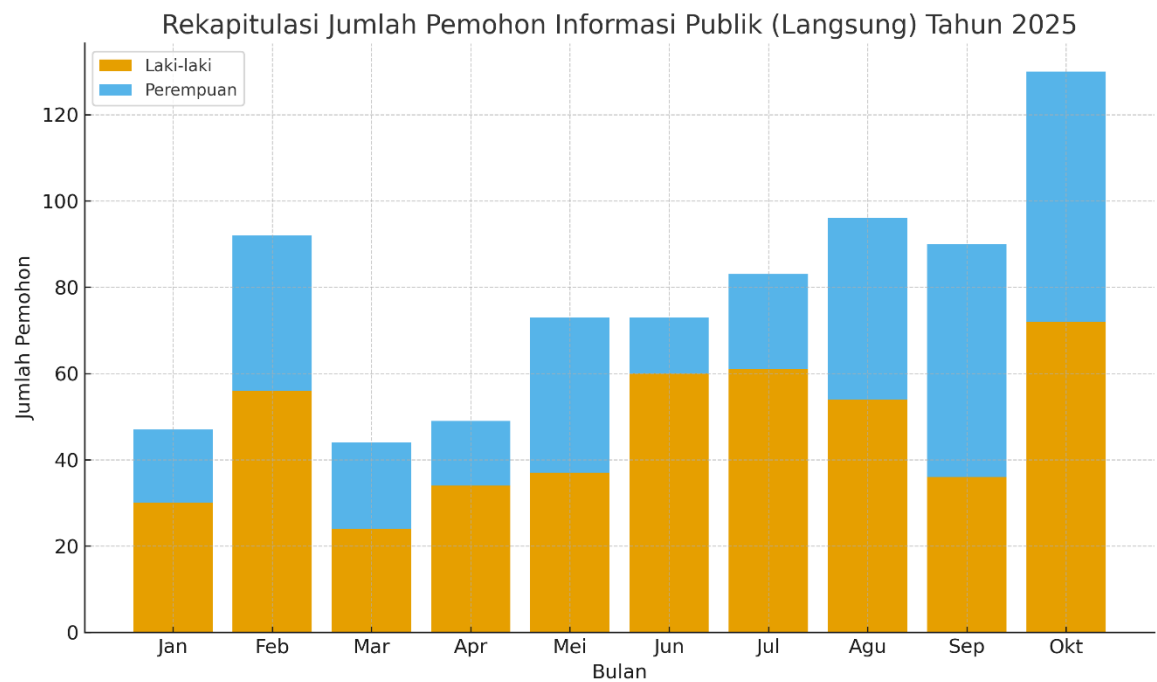
Tabel 1: Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB tahun anggaran 2025.

Dalam rangka pelayanan informasi, saluran informasi yang digunakan sebagai berikut:

NO	Saluran	Alamat
1	Portal PPID	https://ntb-BRMP-ppid.pertanian.go.id/
2	Website	https://ntb.BRMP.pertanian.go.id/
3	Facebook	https://web.facebook.com/BRMPNusaTenggaraBarat
4	Wa	CS BRMP NTB
5	Instagram	https://www.instagram.com/BRMPntb
6	Twiter	https://x.com/BRMPNTB
7	Youtube	https://youtube.com/@BRMPnusatenggarabarat

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK (LANGSUNG) PADA TAHUN 2025

Jumlah Pengunjung	Jumlah	L	P
JAN	47	30	17
FEB	92	56	36
MAR	44	24	20
APR	49	34	15
MAY	73	37	36
JUN	73	60	36
JUL	83	61	22
AUG	96	54	42
SEP	90	36	54
OCT	128	72	58



Dapat terlihat bahwa jumlah pemohon meningkat signifikan pada bulan Oktober, dengan dominasi pemohon laki-laki di sebagian besar bulan, sementara partisipasi perempuan juga meningkat pada triwulan akhir tahun

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON (TIDAK LANGSUNG) PADA TAHUN 2025

NO	Bulan	Fortal PPID	FB	IG	WA	Twiter	Lainnya
1	Januari						

2	Februari						
3	Maret						
4	April				2		
5	Mei				4		
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober				10		
11	November						
12	Desember						
Jumlah							

Berdasarkan hasil rekapitulasi sementara tahun 2025, jumlah pemohon informasi publik melalui saluran tidak langsung (seperti portal PPID, media sosial, dan WhatsApp) masih tergolong rendah dibandingkan dengan pemohon secara langsung. Dari Januari hingga November 2025, tercatat hanya terdapat permohonan informasi melalui saluran WhatsApp, dengan total 16 permohonan yang tersebar pada beberapa bulan tertentu.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON (USIA,)

No	Rentang Usia	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
1	≤20	5	38	0	0	2	1	2	1	1	0
2	21-30	16	20	20	25	28	32	42	65	49	69
3	31-40	7	16	10	6	11	7	11	11	9	35
4	41-50	14	17	6	9	19	11	14	9	7	15
5	51-60	3	0	8	9	11	10	11	5	3	9
6	>60	2	1	0	0	2	3	1	0	1	0
Jumlah	Tidak Diketahui	0	0	0	0	0	9	2	5	20	10
		47	92	44	49	73	73	83	96	90	138

Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemohon informasi publik menurut kelompok usia pada tahun 2025, terlihat bahwa pemohon didominasi oleh kelompok usia 21–30 tahun yang konsisten menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak pada setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa

kelompok usia muda produktif memiliki tingkat kesadaran dan kepedulian tinggi terhadap keterbukaan informasi publik. Aktivitas permohonan juga meningkat signifikan pada bulan Oktober, dengan total 138 pemohon, di mana kelompok usia 21–30 tahun mencapai 69 orang, disusul oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 35 orang. Sementara itu, kelompok usia di bawah 20 tahun hanya aktif pada awal tahun, khususnya Februari, yang diduga berasal dari kalangan pelajar atau mahasiswa yang melakukan kunjungan studi.

Kelompok usia 41–50 tahun dan 51–60 tahun menunjukkan tren yang relatif stabil sepanjang tahun, dengan jumlah pemohon antara 5 hingga 19 orang per bulan. Adapun kelompok usia di atas 60 tahun tercatat sangat sedikit, menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat lanjut usia terhadap layanan informasi publik masih rendah. Data juga memperlihatkan adanya peningkatan pada kategori “tidak diketahui” sejak bulan Juni hingga Oktober, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam pencatatan identitas pemohon. Secara keseluruhan, komposisi ini mengindikasikan bahwa kelompok usia produktif (21–40 tahun) merupakan segmen utama dalam pelayanan informasi publik, sekaligus mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi dari lembaga pemerintah.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON (PEKERJAAN)

No	Jenis Pekerjaan	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
1	PNS	10	10	10	10	19	5	7	6	16	19
2	Swasta	5	17	13	10	15	9	12	20	6	28
3	Mahasiswa	5	8	13	17	26	29	25	39	52	61
4	Guru	7	6		1	4	7	0	0	0	10
6	Dosen	2	6		2	3	2	1	3	0	20
7	Petani	7	5	9	7	4	24	13	6	5	
8	Penangkar	0			1			0	0		
9	PPL	0			1	1	2				
10	Wiraswasta	1									
11	Peternak	0									
12	Siswa	2	40								
13	Lainnya	0					18	25	22	11	11
Jumlah		47	92	44	49	73	73		96	90	138

Berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Pekerjaan selama periode Januari hingga Oktober 2025, terlihat adanya tren peningkatan jumlah pemohon dari berbagai latar belakang profesi. Kelompok Mahasiswa menjadi yang paling dominan hampir di setiap

bulan, dengan peningkatan signifikan terutama pada bulan Agustus hingga Oktober. Kelompok PNS dan Swasta juga menunjukkan konsistensi dalam jumlah pemohon, mencerminkan tingginya partisipasi dari kalangan pekerja formal. Sementara itu, kelompok Petani, Guru, dan Dosen menunjukkan fluktuasi namun tetap berkontribusi terhadap total keseluruhan. Sejak pertengahan tahun, kategori Lainnya mulai aktif dengan jumlah yang cukup besar, menandakan adanya diversifikasi latar belakang masyarakat yang terlibat. Secara keseluruhan, jumlah pemohon meningkat dari 47 orang pada Januari menjadi 138 orang pada Oktober, menunjukkan adanya tren positif terhadap minat dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan atau layanan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON (TUJUAN KEPERLUAN)

No	Kebutuhan Informasi	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
1	Agribisnis	47	89	42	49	67	93	83	96	90	138
2	Keuangan	0		2		6	3				
3	Kepegawean	0									
4	Pengadaan	0									
5	Lainnya	0	3								
Jumlah		47	92								

Berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Pemohon Berdasarkan Tujuan Keperluan selama periode Januari hingga Oktober 2025, terlihat bahwa sebagian besar permohonan diajukan dengan tujuan kebutuhan informasi terkait agribisnis. Kategori agribisnis mendominasi secara konsisten di setiap bulan dengan tren peningkatan signifikan, dari 47 pemohon pada bulan Januari menjadi 138 pemohon pada bulan Oktober. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap bidang agribisnis, baik untuk kebutuhan usaha, penelitian, maupun pengembangan kegiatan pertanian.

Sementara itu, permohonan dengan tujuan keuangan hanya muncul pada beberapa bulan, yaitu Maret, Mei, dan Juni, dengan jumlah yang relatif kecil. Kategori kepegawaian dan pengadaan tidak mencatat adanya permohonan selama periode tersebut. Adapun kategori lainnya hanya muncul pada bulan Februari dengan jumlah yang juga terbatas.

Secara umum, data ini menggambarkan bahwa bidang agribisnis menjadi fokus utama masyarakat dalam mengakses layanan atau informasi yang disediakan, mencerminkan besarnya perhatian terhadap sektor pertanian dan usaha berbasis hasil pertanian sepanjang

tahun 2025.

**REKAPITULASI PENDERASAN INFORMASI DISEMINASI
(MEDIA SOSIAL)**

Media Sosila	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT
Facebook	18	26	48	14	22	21	29	29	22	32
Intagram	18	26	48	14	22	21	29	29	22	32
Twiter	18	26	48	14	22	21	29	29	22	32
Youtube	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tiktok	18	26	48	14	22	21	29	29	22	32
Website	18	26	48	14	22	21	29	29	22	32

Berdasarkan data Rekapitulasi Penderasan Informasi Diseminasi melalui Media Sosial periode Januari hingga Oktober 2025, terlihat bahwa aktivitas penyebaran informasi dilakukan secara konsisten melalui berbagai platform digital. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan Website menunjukkan pola aktivitas yang relatif sama di setiap bulan, dengan peningkatan signifikan pada bulan Maret yang mencapai 48 unggahan atau kegiatan diseminasi, kemudian sempat menurun pada bulan April, dan kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai puncak pada bulan Oktober.

Sementara itu, platform YouTube menunjukkan aktivitas yang stabil namun dengan frekuensi lebih rendah dibandingkan media sosial lainnya, yaitu rata-rata dua unggahan per bulan sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan YouTube masih bersifat pelengkap dalam strategi diseminasi informasi.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa media sosial berperan penting dalam memperluas jangkauan informasi dan menjaga kontinuitas penyebaran kegiatan kelembagaan. Konsistensi dalam penggunaan berbagai platform digital menjadi indikator bahwa strategi komunikasi publik telah berjalan dengan baik dan adaptif terhadap kebutuhan audiens di era digital.

**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON
(YANG DITOLAK)**

Bulan	Jumlah Pemohon		Alasan Permohonan yang ditolak		
	Diterima	Ditolak	Dikecualikan	Belum didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari	47	0	0	0	0
Februari	92	0	0	0	0
Maret	44	0	0	0	0
April	51	0	0	0	0
Mei	77	0	0	0	0
Juni	73	0	0	0	0
Juli	83	0	0	0	0
Agustus	96	0	0	0	0
September	90	0	0	0	0
Oktober	138	0	0	0	0
November		0	0	0	0
Desember		0	0	0	0
Jumlah					

Dalam pelayanan PPID BRMP NTB, dapat disorot bahwa keberhasilan layanan ini tercermin dari fakta bahwa jumlah permohonan yang ditolak nihil. Artinya, tidak ada satu pun permohonan yang telah ditolak oleh PPID, mencerminkan transparansi yang tinggi serta keterbukaan dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat

Keadaan di mana tidak terdapat penolakan permohonan menunjukkan kesungguhan PPID BRMP NTB dalam memberikan respons positif terhadap setiap permohonan yang masuk. Ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses permohonan berjalan dengan baik, dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka perlukan tanpa hambatan atau pembatasan yang tidak diperlukan.

Kondisi ini memberikan gambaran positif terkait dengan pelayanan PPID BRMP NTB dan

kesediaannya untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan dan diperlukan.

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON (YANG MENGAJUKAN KEBERATAN)

Bulan	Pemohon mengajukan Keberatan	Alasan Mengajukan Keberatan	Penyelesaian
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	0	0	0

(PPID) NTB melaporkan bahwa dalam periode Januari sampai bulan Desember 2024, tidak terdapat satu pun permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Tidak adanya permohonan keberatan mencerminkan kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh BRMP NTB. Kemungkinan faktor-faktor tersebut melibatkan pelaksanaan layanan yang efisien, penyediaan informasi yang transparan, serta responsif terhadap kebutuhan dan pertanyaan pemohon. Selain itu, adanya upaya yang proaktif untuk memberikan edukasi terkait proses-proses yang terlibat dalam permohonan dan pemenuhan kebutuhan informasi dapat membantu mencegah munculnya keberatan. Jika pelayanan diselenggarakan dengan baik, tingkat kepuasan pemohon meningkat, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan di mana permohonan keberatan menjadi jarang terjadi.

REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam layanan PPID BRMP NTB, dapat ditekankan bahwa waktu yang diperlukan untuk merespon dan menyelesaikan permohonan sangat cepat. Kecepatan ini mencerminkan komitmen PPID dalam memberikan layanan yang efisien dan responsif, memastikan bahwa

pemohon mendapatkan akses ke informasi yang mereka butuhkan dengan segera. Hal ini juga menciptakan pengalaman positif, menunjukkan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien.

SARANA DAN PRASARAN

Saluran Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditujukan kepada PPID BRMP NTB akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID BRMP NTB. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang ada dengan mengisi identitas pemohon. BRMP NTB memiliki beberapa saluran layanan permohonan informasi:

1. Desk Layanan Informasi Publik

Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung ke BRMP NTB dapat mendatangi Kantor BRMP NTB di yang ada di Jln raya peninjayan Narmada Lombok Barat. Layanan BRMP NTB yang dilengkapi dengan sarana pendukung diantaranya seperangkat computer untuk pengelola layanan, pesawat telepon, printer, meja dan kursi. Sementara di ruangan humas dilengkapi dengan ruang tunggu, meja sofa tamu, AC dan petugas humas yang selalu ada.

2. Layanan melalui website

BRMP NTB melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengembangkan sistem pelayanan informasi yang memenuhi standar nasional. Sistem ini didesain untuk memberikan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan yang berlaku.

Dengan komitmen yang tinggi terhadap layanan informasi, BRMP NTB memastikan bahwa setiap interaksi dengan publik dilakukan secara profesional. Kecepatan dan akurasi dalam penyediaan informasi menjadi fokus, sementara prosedur yang mudah diakses memberikan pengguna kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

BRMP NTB menawarkan layanan informasi melalui platform online, terutama melalui website resmi : (<https://ntb.BRMP.pertanian.go.id>) Selain itu, publik juga dapat menghubungi BRMP NTB melalui email di BRMP.ntb@pertanian.go.id. Dengan adanya kanal-kanal ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan mendukung

transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

4. Layanan melalui Telepon

PPID BRMP NTB tidak hanya menyediakan layanan informasi publik melalui aplikasi berbasis Android dan kanal online, tetapi juga dapat dihubungi melalui telepon dengan nomor (0370)671312. Dengan demikian, BRMP NTB berupaya memberikan beragam opsi akses kepada masyarakat, termasuk melalui komunikasi langsung via telepon untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

5. Layanan melalui Media Sosial BRMP NTB

PPID BRMP NTB aktif memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai saluran untuk mendidik masyarakat tentang konsep keterbukaan informasi publik. Dalam upaya ini, tidak hanya penyebaran informasi tentang keterbukaan informasi, tetapi juga fokus pada memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan di BRMP NTB.

Melalui media sosial, BRMP NTB dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menyampaikan informasi terkini, dan menjelaskan prosedur terkait penyediaan informasi publik. Dengan pendekatan ini, BRMP NTB berusaha menciptakan kesadaran yang lebih dalam di kalangan masyarakat sekaligus memperkuat keterlibatan mereka dalam memahami dan mendukung prinsip keterbukaan informasi.

Beberapa saluran yang digunakan antara lain:

NO	Saluran	Alamat
1	Portal PPID	https://ntb-BRMP-ppid.pertanian.go.id/
2	Website	https://ntb.BRMP.pertanian.go.id/
3	Facebook	https://web.facebook.com/BRMPNusaTenggaraBarat
4	Wa	CS BRMP NTB
5	Instagram	https://www.instagram.com/BRMPntb
6	Twiter	https://x.com/BRMPNTB
7	Youtube	https://youtube.com/@BRMPnusatenggarabarot

Fasilitas Layanan Informasi Publik dan Prosedur

Layanan Laboratorium Pengujian

Laboratorium pengujian BRMP NTB memainkan peran sentral sebagai pusat layanan

pengujian sample yang komprehensif. Dengan perangkat dan fasilitas canggih, laboratorium ini tidak hanya melayani pengujian sampel, tetapi juga berfungsi sebagai entitas strategis dalam memastikan integritas, keakuratan, dan keandalan hasil pengujian.

Dalam mengemban tugasnya, laboratorium BRMP NTB menawarkan layanan pengujian sampel kimia tanah, pupuk organik, pupuk anorganik, jaringan tanaman.

Sebagai bagian integral dari BRMP NTB, laboratorium ini tidak hanya berkomitmen untuk memenuhi standar pengujian yang ketat, tetapi juga terus berinovasi dalam memperluas cakupan layanannya. Dengan demikian, laboratorium pengujian BRMP NTB tidak hanya menjadi penyedia layanan yang handal tetapi juga menjadi sumber informasi yang berharga untuk mendukung perkembangan dan kesinambungan sektor pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian

PPID BRMP NTB menerima layanan konsultasi peroranga, instansi. Ini dapat melibatkan dialog atau interaksi antara berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat umum. Fokusnya mencakup bagaimana informasi publik dapat disediakan, diakses, dan dipahami dengan lebih baik. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik.

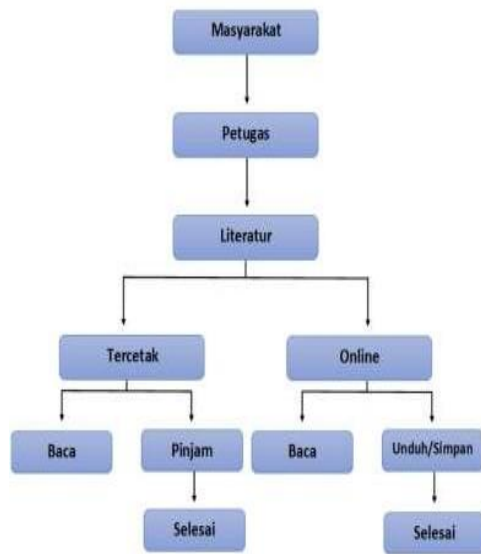
- Konsultasi dapat dilakukan dengan datang langsung/tidak langsung melalui telpon/surat/email/aplikasi/CS Online (WA) atau Portal PPID.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu dan melengkapi data diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku.
- Petugas menerima dan mencatat serta menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang
- Pejabat mendisposisi kepada pelaksana layanan
- Pelaksana layanan memberikan layanan
- Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan menyiapkan keterangan tertulis yang di tandatadangani oleh sub koordinator KSPP, kecuali untuk data yang dikecualikan dapat dilakukan penolakan
- Pemohon informasi/rekomendasi mengambil data/ informasi/ rekomendasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan informasi/rekomendasi
- Pemohon mengisi link survey SKM yang disediakan



Perpustakaan

Dalam layanan PPID, perpustakaan menjadi salah satu fasilitas yang memegang peran penting. Perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi publik yang beragam, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan untuk masyarakat. Dengan koleksi yang terkait dengan kebijakan publik, regulasi, dan informasi terkini, perpustakaan PPID menjadi tempat di mana masyarakat dapat mengakses referensi yang relevan dan mendukung pemahaman mereka terhadap isu-isu publik. Dengan demikian, perpustakaan menjadi elemen integral dalam upaya PPID untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.

- Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka;
- Petugas melakukan penelusuran yang dibutuhkan;
- Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online;
- Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka *website* perpustakaan BPSIP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan;
- Petugas membantu melakukan penelusuran atau atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri;
- Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan;
- Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan;
- Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman;
- Pemustaka mengisi link SKM



Kunjungan Agro eduwisata

Fasilitas layanan Agro Edu Wisata di Taman Agroinovasi BRMP NTB bukan hanya sekadar tempat pendidikan, tetapi juga merupakan destinasi yang memadukan edukasi dan rekreasi di sektor pertanian. Pengunjung dapat menikmati pengalaman belajar interaktif tentang inovasi-inovasi terkini dalam pertanian sambil mengeksplorasi keindahan lingkungan taman. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang teknologi pertanian modern, praktek berkelanjutan, dan peran inovasi dalam meningkatkan produktivitas sektor agrikultur di NTB. Dengan demikian, Agro Edu Wisata Taman Agroinovasi BRMP NTB menjadi wahana yang menggabungkan pendidikan dan hiburan, mendorong kesadaran publik tentang pentingnya inovasi dalam pembangunan sektor pertanian

- Pengguna layanan mengajukan permohonan;
- Pengguna layanan mengisi buku tamu dan melengkapi data diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku;
- Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang;
- Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada penanggung jawab Taman Agro eduwisata;
- Penanggung jawab dan tim taman agro eduwisata menyiapkan segala keperluan dan melaksanakan layanan kunjungan;

- Tim mendokumentasikan hasil kegiatan agro eduwisata;
- Pemohon layanan mengisi form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan oleh petugas layanan



(Pembelian atau Bantuan Benih Tanaman Pangan bersertifikat atau Bibit Ternak terstandar)

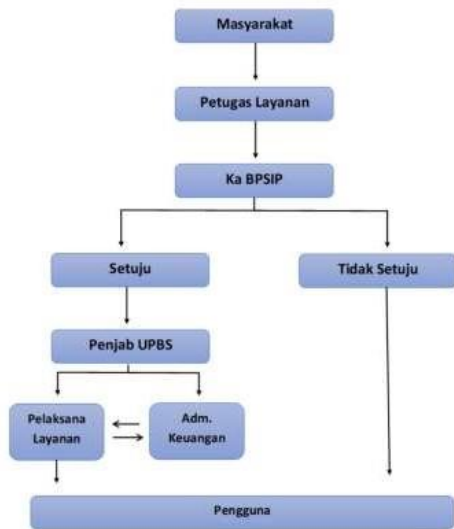
Melalui Penjualan

- Pengguna layanan mengajukan permohonan;
- Petugas layanan menyerahkan form pemesanan kepada Penanggung Jawab UPBS;
- Penanggung jawab UPBS akan melakukan pengecekan ketersediaan benih/bibit;
- Pengguna layanan melunasi pembayaran sesuai pesanan kepada petugas pembayaran;
- Khusus untuk pemesanan Komoditas Peternakan, di list terlebih dahulu, apabila bibit sudah tersedia (akan diinformasikan kepada pengguna layanan);
- Penanggung jawab dan pelaksana UPBS menyiapkan pesanan benih/bibit dari pengguna layanan;
- Pengguna layanan dapat mengambil langsung pesanan benih/bibit atau meminta Petugas UPBS untuk mengirimkan pesanan dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.



Melalui Hibah/Bantuan

- Pengguna layanan mengajukan Surat permohonan bantuan benih/bibit;
 - Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BPSIP;
 - Kepala BPSIP berkoordinasi dengan penanggung jawab UPBS terkait dengan ketersediaan stok bantuan;
 - Apabila permohonan bantuan disetujui, maka Kepala BPSIP menerbitkan surat persetujuan permohonan bantuan;
 - Penanggung jawab UPBS menugaskan Pelaksana UPBS untuk menyiapkan pesanan;
 - Pelaksana UPBS menyiapkan Berita Acara permohonan bantuan
- Pengguna layanan dapat mengambil langsung atau meminta Petugas UPBS untuk mengirimkan pesanan dengan biaya pengiriman sesuai dengan kesepakatan



INOVASI LAYANAN PPID BRMP NTB

Layanan melalui PPID Mobile/WA

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam paradigma komunikasi, terutama dengan kemunculan gawai yang memungkinkan setiap individu mengakses informasi dengan cepat dan mudah, tanpa terkendala oleh batasan ruang dan waktu. Menanggapi evolusi ini, BRMP NTB telah merespons dengan menghadirkan aplikasi layanan digital PPID berbasis Android.

Aplikasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memohon informasi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 13, BRMP NTB berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat dan tepat. Sebagai langkah nyata, PPID BRMP NTB terus mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Aplikasi PPID Mobile berbasis Android ini tidak hanya memudahkan kepada pelanggan untuk melakukan permohonan layanan namun juga mempercepat pelanggan dalam menerima respon dan tanggapan dari petugas PPID. Aplikasi ini memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan permohonan informasi secara efisien.

Layanan Satu Pintu Terintegrasi (SISAPUK)

SISAPUK merupakan inovasi layanan satu pintu terintegrasi yang menghubungkan seluruh layanan dari setiap unit di BRMP NTB. Melalui aplikasi ini, pemohon cukup mengakses satu platform untuk terhubung langsung dengan layanan yang dibutuhkan tanpa harus datang ke masing-masing unit. Sistem ini dirancang untuk memudahkan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di lingkungan BRMP NTB.

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NTB

PELAYANAN PUBLIK BRMP NTB

1. Layanan Penerapan dan Diseminasi Modernisasi Pertanian
2. Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian
3. Layanan Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi

**KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN**
PERMENPANRB NO. 15 TAHUN 2014

SI-SAPUK
SISTEM INFORMASI LAYANAN PUBLIK **SATU PINTU** TERKONEKSI

<http://ntb.brmp.pertanian.go.id>,
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, (BRMP Nusa Tenggara Barat),
<http://brmp.ntb-ppid.pertanian.go.id> (portal PPID BRMP Nusa Tenggara Barat)

ntb.brmp.pertanian.go.id | BRMP NTB

CAPAIAN PPID BRMP TAHUN 2023

BRMP NTB memberikan pelayanan kepada pengunjung yang datang langsung ke BRMP NTB. Tujuan pengunjung/pelanggan dalam rangka kegiatan kerjasama maupun terkait permintaan informasi baik. Dalam kurun waktu tahun 2023 Sebanyak 1190 orang dengan datang secara langsung ke kantor BRMP NTB melalui layanan utama, selanjutnya oleh petugas PPID pengunjung akan diarahkan sesuai tujuan layanan seperti layanan UPBS tanaman/ternak, laboratorium pengujian tanah, dan layanan perpustakaan. Sementara yang melalui WA Online terpadu sebanyak orang dan melalui media sosial sebanyak orang. pelanggan akan direspon langsung sesuai permintaan pelanggan. Adapun jenis informasi yang diminta oleh pengunjung meliputi konsultasi, kerjasama uji mutu pupuk, kerjasama uji efektivitas pupuk, pengujian, kerjasama, PKL dengan SMK dan perguruan Tinggi, laporan, permintaan dan informasi bibit/benih serta informasi

umum.

Informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dilayani dengan baik dan diberikan konsultasi sesuai dengan permintaan. Informasi yang diminta diselesaikan pada hari itu juga (dalam waktu 1 hari). Untuk permintaan PKL/Magang dapat berlangsung atau paling lama 3 (tiga) bulan, layanan pengujian diselesaikan sesuai parameter yang diuji dan SOP yang berlaku. Demikian halnya dengan kerjasama uji mutu pupuk, kerjasama uji efektivitas pupuk dan kerjasama lainnya.

Penyusunan Pelaporan Informasi Publik (DIP)

Menyampaikan laporan PPID secara rutin setiap bulan merupakan bagian penting dari kegiatan kehumasan dan kerjasama. Biasanya, laporan PPID berisi informasi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh suatu badan atau institusi.

Pembuatan laporan PPID setiap bulan penting karena beberapa alasan:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Laporan bulanan menunjukkan transparansi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memahami bagaimana informasi dikelola dan diakses.
2. **Evaluasi Kinerja:** Laporan bulanan membantu dalam mengevaluasi kinerja PPID. Dengan memantau jumlah permohonan, jenis informasi yang diminta, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum transparansi, institusi bisa menilai kinerja PPID.
3. **Perbaikan dan Perencanaan Strategis:** Dengan melihat kendala yang mungkin muncul dalam pengelolaan informasi, laporan bulanan memungkinkan identifikasi area yang perlu perbaikan. Ini membantu dalam perencanaan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan PPID.
4. **Kepatuhan Hukum:** Sebagian besar regulasi mengharuskan institusi/instantia tertentu untuk melaporkan aktivitas mereka secara berkala. Melalui laporan bulanan, institusi memastikan kepatuhan terhadap hukum terkait pengelolaan informasi.
5. **Meningkatkan Kepuasan Publik:** Dengan memberikan akses informasi yang transparan dan menyediakan laporan rutin, institusi dapat meningkatkan kepuasan publik dalam hal akses informasi.

Secara keseluruhan, laporan bulanan PPID adalah alat penting dalam memastikan transparansi, mengevaluasi kinerja, mematuhi regulasi, dan meningkatkan kualitas layanan terkait informasi yang disediakan kepada publik.

Dalam menyusun laporan PPID bulanan, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Ringkasan Kegiatan: Ringkasan singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID selama bulan tersebut.
2. Jumlah Permohonan Informasi: Jumlah permohonan informasi yang diterima selama bulan tersebut. Ini termasuk jumlah permohonan yang diproses, selesai, atau yang masih dalam proses.
2. Jenis Informasi yang Diminta: Gambaran mengenai jenis informasi yang paling banyak diminta selama bulan tersebut.
3. Lama penyelesaian. Menggambarkan waktu yang dibutuhkan dalam menangani permohonan.

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik melalui Survei

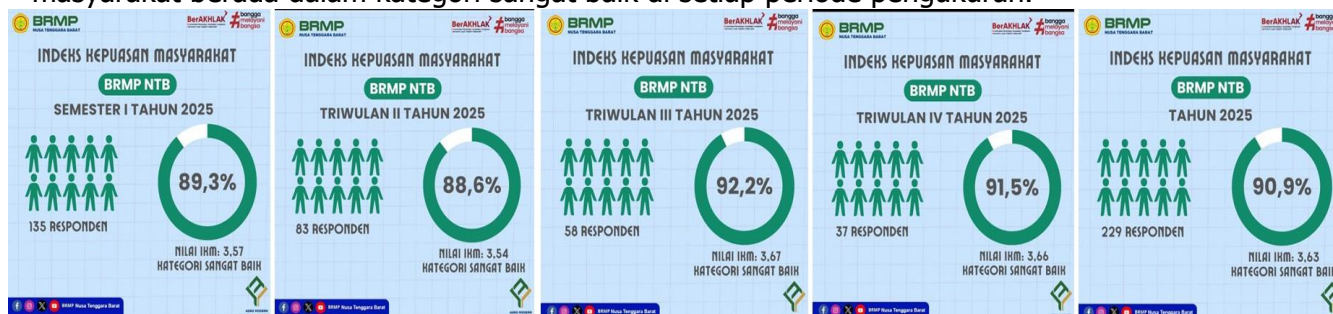
Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

BSI NTB sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BRMP NTB sebagai Badan Publik.

Berdasarkan hasil analisa pada hasil pengukuran terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BRMP NTB dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kualitas unsur pelayanan publik BRMP NTB dipersepsikan Baik yang secara rinci akan dijabarkan dalam laporan yang dituangkan pada lampiran dibawah ini. Pelaporan IKM di BRMP NTB dilakukan setiap 3 bulan sekali. Untuk layanan informasi publik dan kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut:

BRMP NTB secara rutin melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tiga bulan

sekali untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, termasuk layanan informasi publik dan kerja sama. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada dalam kategori sangat baik di setiap periode pengukuran.



Pada Semester I Tahun 2025, IKM tercatat sebesar 89,3% dengan nilai 3,57 dari 135 responden. Selanjutnya, pada Triwulan II mencapai 88,6% (nilai 3,54) dari 83 responden, dan meningkat pada Triwulan III menjadi 92,2% (nilai 3,67) dari 58 responden. Pada Triwulan IV, nilai IKM sebesar 91,5% (nilai 3,66) dengan 37 responden. Secara keseluruhan, capaian IKM tahunan tahun 2025 mencapai 90,9% dengan nilai 3,63, yang menegaskan bahwa kualitas layanan BRMP NTB berada pada kategori sangat baik.

Peningkatan nilai IKM ini mencerminkan komitmen BRMP NTB dalam memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan responsif, khususnya pada layanan informasi publik dan kerja sama yang terus dioptimalkan agar semakin mudah diakses dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemeringkatan Informasi Publik

BRMP NTB mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan nilai 85 setelah melalui monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terhadap 120 PPID UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari perwujudan demokrasi dimana setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan. Hasil monitoring dan evaluasi ini merupakan wujud transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dimana setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Penilaian berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan

money yang dilakukan adalah 3 tahapan, yakni tahapan pengintaian (reconnaissance), verifikasi dan presentasi bagi PPID UK/UPT yang masuk pada kategori Informatif

BRMP NTB Gelar Publik Hearing

11 September 2025 –BRMP NTB menyelenggarakan Public Hearing Standar Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Maklumat Pelayanan dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik, bertempat di Aula Mandalika BRMP NTB.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha BBPRMP, Ombudsman RI Perwakilan NTB, unsur pemerintah daerah, serta para stakeholder dan pengguna layanan BRMP NTB.

Dalam sambutannya, Ka Bag BBPRMP, yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting, menyampaikan apresiasi kepada BRMP NTB atas langkah awal penyelenggaraan Public Hearing lingkup BRMP se-Indonesia.

"Forum ini sangat penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," ujarnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, juga hadir dan menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik. "Pelayanan publik harus sesuai kebutuhan masyarakat dan terus berkembang mengikuti zaman. Standar pelayanan bukan sekadar dokumen, melainkan janji dan kewajiban penyelenggara layanan agar cepat, mudah, terjangkau, dan terukur," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BRMP NTB menegaskan bahwa kekuatan BRMP NTB ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas kebun percobaan, unit pengelola benih dan bibit, serta sarana pengujian yang memadai. "Dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, kami berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan sesuai standar, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan pengguna layanan," tegasnya. BRMP NTB juga meluncurkan Sistem Informasi Layanan Publik Satu Pintu Terkoneksi (SI SAPUK), sebuah aplikasi layanan terpadu yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan BRMP NTB secara cepat, transparan, dan terintegrasi.

Materi mengenai Standar Pelayanan Publik dipaparkan oleh Ketua Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, drh. Luh Gde Sri Astiti. Penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berlangsung interaktif. Banyak peserta menilai forum ini dapat menjadi contoh positif bagi instansi lain dalam membangun pelayanan publik yang transparan dan partisipatif.

Puncak acara ditandai dengan Penandatanganan Maklumat Pelayanan dan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik. Dalam maklumat tersebut, BRMP NTB menyatakan kesanggupan

menyelenggarakan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan, serta siap menerima sanksi bila tidak menepati komitmen tersebut.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen BRMP NTB dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.



PENUTUP

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik. PPID BRMP NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan aksesibilitas data, memastikan ketersediaan informasi yang relevan, serta memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat dihargai guna menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung pertumbuhan komunitas. Kami yakin kerjasama ini akan memperkuat fondasi demokrasi dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bersama.